



Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. (bantulkab.go.id)

**b. Batas Wilayah**

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

**c. Luas Wilayah**

Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 Km<sup>2</sup> yang merupakan 15,905 dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki topografi dengan sebagian dataran rendah sebesar 40% dan lebih dari separuhnya sebesar 60% merupakan daerah perbukitan yang cenderung kurang subur. Secara garis besar, Kabupaten Bantul terdiri dari:

- 1) Bagian Timur, merupakan daerah yang landau, miring dan terjal yang keadaannya masih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km<sup>2</sup> (40,65%).
- 2) Bagian Selatan, realitanya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

- 3) Bagian Barat, merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km<sup>2</sup> (17,73% dari seluruh wilayah).
- 4) Bagian Tengah, merupakan daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 Km<sup>2</sup> (41,62 %).

**d. Pembagian Administratif**

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri atas 17 Kecamatan, 75 Desa (kelurahan) dan 933 Pedukuhan. Desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Wilayah paling luas merupakan Kecamatan Dlingo, dengan luas 55,87 Km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan paling banyak terdapat pada Kecamatan Imogiri dengan desa sebanyak delapan dan pedukuhan sebanyak tujuh puluh dua.

Menurut RDTRK dan Peraturan daerah yang ada mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa perdesaan dan perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

**Tabel 2. 1 Luas Kecamatan, Jumlah Desa, dan Dusun di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Srandakan	18,32	2	43
2	Sanden	23,16	4	62
3	Kretek	26,77	5	52
4	Pundong	24,30	3	49
5	Bambanglipuro	22,70	3	45
6	Pandak	24,30	4	49
7	Pajangan	33,25	3	55
8	Bantul	21,95	5	50
9	Jetis	21,47	4	64
10	Imogiri	54,49	8	72
11	Dlingo	55,87	6	58
12	Banguntapan	28,48	8	57
13	Pleret	22,97	5	47
14	Piyungan	32,54	3	60
15	Sewon	27,16	4	63
16	Kasih	32,38	4	53
17	Sedayu	34,36	4	54
Jumlah		504,47	75	933

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

Kecamatan Dlingo memiliki jarak kota kecamatan terhadap desa terjauh, ibukota kabupaten, dan ibukota propinsi, sedangkan jarak Kecamatan terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Bantul dan jarak Kecamatan terdekat dengan ibukota propinsi adalah Kecamatan Sewon dan Kasihan.

## 2. Kondisi Sosial Budaya

### a. Kepadatan Penduduk Geografis

Terdapat beberapa kategori mengenai kepadatan penduduk. Di antaranya yaitu kepadatan penduduk geografis yang menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah per kilometer

persegi. Kepadatan penduduk secara geografis dapat menunjukkan penyebaran penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk pada suatu daerah. Beberapa daerah yang memiliki kepadatan penduduk geografis yang tinggi terletak di Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Kasihan sedangkan kepadatan penduduk geografis rendah terletak di Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Pleret.

**Tabel 2. 2 Kepadatan Penduduk Geografis Tiap Kecamatan Tahun 2012**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan / Km <sup>2</sup>
1	Srandakan	28.935	18,32	1.579
2	Sanden	29.939	23,16	1.293
3	Kretek	29.829	27,77	1.114
4	Pundong	32.097	23,68	1.355
5	Bambanglipuro	37.921	22,7	1.671
6	Pandak	48.558	24,3	1.998
7	Bantul	61.334	21,95	2.795
8	Jetis	53.592	24,47	2.190
9	Imogiri	57.534	54,49	1.056
10	Dlingo	36.165	55,87	647
11	Pleret	45.316	22,97	1.973
12	Piyungan	52.156	32,54	1.603
13	Banguntapan	131.584	28,48	4.620
14	Sewon	110.355	27,16	4.063
15	Kasihan	119.271	32,38	3.683
16	Pajangan	34.467	33,25	1.037
17	Sedayu	45.952	34,36	1.337
Jumlah		506,85	955.952	1.884

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2014

**b. Jumlah Penduduk Dilihat Mata Pencaharian**

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul dilihat dari pekerjaan atau mata pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermatapencaharian

pada bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi/ transportasi, keuangan dan jasa lainnya. Berikut ini merupakan tabel persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja bekerja menurut lapangan pekerjaan utama:

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase
1	Pertanian	25,56
2	Pertambangan dan Penggalian	1,98
3	Industri	18,95
4	Listrik, gas, dan air	0,07
5	Konstruksi	8,88
6	Perdagangan	21,16
7	Komunikasi/transportasi	4,64
8	Keuangan	1,61
9	Jasa	16,89
10	Lainnya	0,27
Jumlah		100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

### 3. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bantul

#### a. Visi

Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.Cerdas

yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

**b. Misi**

Misi merupakan bagian penting dari sebuah tujuan yang akan dilaksanakan. Sedangkan Misi dari Kabupaten Bantul yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan reformasi birokrasi.
- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- 6) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

## **B. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul**

### **1. Profil Dinas Kesehatan**

#### **a. Kedudukan**

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Fungsi**

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi pelaksana rumah tangga dibidang kesehatan, pelaksana tugas perbantuan, dan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### **c. Tugas Pokok**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan.
- 2) Melaksanakan pembinaan umum dibidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Melaksanakan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan farmasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4) Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 5) Memberikan perijinan bidang kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- 8) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## **2. Sejarah**

Sebelum secara resmi menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah ada sebelumnya yang bernama Dinas Kesehatan Rakyat

mengingat perkembangan yang ada maka Dinas Kesehatan Rakyat diubah menjadi Dinas Kesehatan.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bantul telah terbentuk Dinas Kesehatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja bernama Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, didalam keputusan Menteri tersebut susunan Organisasi Dinas Daerah dibedakan menjadi dua pola yaitu pola minimal dan maksimal dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pola minimal terdiri dari Sub Bagian membawai tiga Bagian dan Seksi membawai 3 Sub Seksi
- b. Pola Maksimal terdiri dari Bagian membawai empat Sub Bagian dan Sub Dinas membawai empat Seksi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tersebut telah dikeluarkan surat kawat tertanggal 28 Januari 1995 Nomor 061/2160/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten segera menerapkan Pola Maksimal.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pembagian di daerah yang diperlukan adanya perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang dikuatkan lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

### **3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul**

#### **a. Visi**

"Masyarakat Sehat Yang Mandiri"

#### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Paripurna, Merata dan Berkeadilan
- 2) Menggerakkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

### **4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdiri:

#### **a. Kepala Dinas**

#### **b. Sekretaris**

- 1) Kepala Sub Bagian Program
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
  - 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak
  - 2) Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat
  - 3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- d. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan
  - 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Surveilans
  - 2) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
  - 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra
- e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
  - 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Tenaga Kesehatan
  - 2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Regulasi Kesehatan
  - 3) Kepala Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan
- f. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Sehat
  - 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
  - 2) Kepala Seksi Bina UKBM
  - 3) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Kemitraan
- g. U P T D
  - 1) Puskesmas
  - 2) Gudang Farmasi
  - 3) Laboratorium Air

**Tabel 2. 4 Daftar Faskes I dan Faskes II di Wilayah/Kecamatan yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Bantul**

No	Wilayah/ Kecamatan	Faskes I	Jumlah	Faskes II	Jumlah
1	Bambanglipuro	1. Puskesmas Bambanglipuro	1	1. RS Santa Elisabeth	1
2	Banguntapan	1. Puskesmas Banguntapan I 2. Puskesmas Banguntapan II 3. Puskesmas Banguntapan III	3	1. RS Rajawali Citra Bantul 2. Klinik Utama Bedah Adelia	2
3	Bantul	1. Puskesmas Bantul I 2. Puskesmas Bantul II	2	1. RSK Paru Respira 2. RSUD Bantul 3. RS PKU Muh Bantul	3
4	Dlingo	1. Puskesmas Dlingo I 2. Puskesmas Dlingo II	2	-	-
5	Imogiri	1. Puskesmas Imogiri I 2. Puskesmas Imogiri II	2	-	-
6	Jetis	1. Puskesmas Jetis I 2. Puskesmas Jetis II	2	1. RS Rachma Husada	1
7	Kasihan	1. Puskesmas Kasihan I 2. Puskesmas Kasihan II	2	1. Klinik Hemodialisis Nitipuran	1
8	Kretek	1. Puskesmas Kretek	1	-	-
9	Pajangan	1. Puskesmas Pajangan	1	-	-
10	Pandak	1. Puskesmas Pandak I 2. Puskesmas Pandak II	2	-	-
11	Piyungan	1. Puskesmas Piyungan	1	-	-
12	Pleret	1. Puskesmas Pleret	1	1. RS Kbia Permata Husada	1
13	Pundong	1. Puskesmas Pundong	1	-	-
14	Sanden	1. Puskesmas Sanden	1	-	-
15	Sedayu	1. Puskesmas Sedayu I 2. Puskesmas Sedayu II	2	-	-
16	Sewon	1. Puskesmas Sewon I 2. Puskesmas Sewon II	2	1. RS Patmasuri 2. RSKB Ringroad Selatan 3. RSU Griya Mahardika	3
17	Srandakan	1. Puskesmas Srandakan	1	-	-
	Jumlah		27		13

Sumber: Data Diolah Peneliti BPJS-Kesehatan

## **C. Gambaran Kondisi Puskesmas Kasihan II yang Menjadi Obyek Penelitian**

Puskesmas Kasihan II sebagai salah satu Puskesmas di Kabupaten Bantul yang senantiasa tiada henti berusaha memegang peranan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Berbagai kiat telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggungjawab atas kesehatan lingkungan serta perilaku hidup sehat secara mandiri.

### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Kasihan merupakan satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Letak Kecamatan Kasihan kurang lebih 10 kilometer arah barat laut dari ibukota Kabupaten Bantul. Adapun jarak ibukota Kecamatan Kasihan dengan ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih 5 kilometer. Sebagian wilayah Kecamatan Kasihan bagian utara berbatasan dengan wilayah Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dan sebagian lagi terletak di selatan jalan lingkar selatan. Letak geografis ini menyebabkan masyarakat di wilayah Kecamatan Kasihan majemuk karena berada di perbatasan antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan cara pandang serta kesadaran masyarakat dalam hal upaya pemeliharaan kesehatan.

Kecamatan Kasihan terdiri atas 4 desa yaitu Desa Bangunjiwo, Tamantirto, Tirtonirmolo dan Ngestiharjo. Adapun wilayah kerja Puskesmas Kasihan II terdiri dari 2 desa yaitu desa Tirtonirmolo dan

Ngestiharjo, sedangkan Bangunjiwo dan Tamantirto masuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas Kasihan I.

Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Kasihan II adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan  
Kotamadya Yogyakarta
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan  
Kotamadya Yogyakarta
- d. Sebelah Barat : Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten  
Bantul

## **2. Letak Demografi**

Jumlah penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Kasihan II yaitu Desa Tirtonirmolo dan Ngestiharjo pada Tahun 2016 berdasarkan data monografi desa tercatat 52.751 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 17.176, sehingga dalam tiap keluarga rata-rata terdiri dari 3 jiwa. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan cukup berimbang, dengan jumlah penduduk perempuan (26.296 jiwa) lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki (26.455 jiwa).

## **3. Sumber Daya Puskesmas**

- a. Ketenagaan
  - 1) Dokter Umum : 3 orang
  - 2) Dokter Gigi : 1 orang

- 3) Bidan : 6 orang
- 4) Perawat Gigi : 2 orang
- 5) Perawat Umum : 6 orang
- 6) Petugas Gizi : 2 orang
- 7) Sanitarian : 1 orang
- 8) Petugas Laboratorium : 1 orang
- 9) Pengelola Obat : 1 orang
- 10) Pekarya Kesehatan : 2 orang
- 11) Tata Usaha : 2 orang

b. Ruang dan Pelayanan Puskesmas

- 1) Pendaftaran
- 2) Ruang Tunggu
- 3) Ruang Poli:
  - a) UGD
  - b) KIA
  - c) MTBS
  - d) Umum ber AC
  - e) Lansia
  - f) Gigi ber AC
  - g) Yankestradkom
  - h) Farmasi ber AC
  - i) Laboratorium
  - j) Mushola

- k) AULA ber AC
  - l) Parkir Pelanggan yang luas
- c. Konseling ber AC
- 1) PHBS
  - 2) Jiwa
  - 3) Gizi
  - 4) Calon Pengantin

**Tabel 2. 5 Program Kesehatan Puskesmas Kasihan II**

NO	PROGRAM KESEHATAN
1	KIA
2	KB
3	IMUNISASI
4	GIZI
5	KESEHATAN LINGKUNGAN
6	P2M
7	PKM
8	UKK
9	UKS
10	PHN
11	KESEHATAN JIWA DAN REMAJA
12	KESEHATAN MATA
13	TOGA/BATTRA
14	USILA
15	LABORATORIUM
16	SP2TP
17	PENGOBATAN
18	KESEHATAN GIGI MULUT

Sumber: Puskesmas Kasihan II

Tabel di atas menunjukkan daftar program kesehatan yang ada di Puskesmas Kasihan II. Di Puskesmas Kasihan II melayani 18 program kesehatan. Diantaranya KIA, KB, Imunisasi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, P2M, PKM, UKK, UKS, PHN, Kesehatan Jiwa dan

Remaja, Kesehatan Mata, Toga/Battra, Usila, Laboratorium, SP2TP, Pengobatan, Kesehatan Gigi Mulut.

#### **4. Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kasihan II**

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kasihan II sudah dilaksanakan sejak Tahun 2013 dan sudah disosialisasikan kepada seluruh pihak, dalam hal ini termasuk masyarakat sekitar Puskesmas Kasihan II. Komunikasi pertama berasal dari Pemerintah Pusat yang kemudian mengkomunikasikan/mensosialisasikan Program JKN tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota inilah yang mensosialisasikan kepada puskesmas-puskesmas. Nantinya puskesmas yang mensosialisasikan kepada pihak swasta dan masyarakat.

Puskesmas Kasihan II sebagai penanggungjawab dan pengelola penyelenggaraan program JKN di wilayah Puskesmas Kasihan II yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bantul sangat mendukung dan menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai payung hukum yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan program JKN di Puskesmas Kasihan II sudah sesuai dengan payung hukum yang ada di Indonesia yaitu dengan menerapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 yang digunakan sebagai payung hukum dan arah pelaksanaan

program JKN. Mulai dari perencanaan penyelenggaraan program JKN, sampai dengan evaluasinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Pihak penyelenggara program JKN pun di sesuaikan dengan peraturan menteri tersebut, tentang siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan program JKN di Puskesmas Kasihan II.

tujuan dari program JKN yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan kepada peserta secara menyeluruh, terstandar, dengan sistem pengelolaan yang terkendali mutu dan biaya.

Kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 2019.

Peraturan daerah Kabupaten Bantul yang mengatur tentang JKN adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Puskesmas merupakan pihak yang langsung mensosialisasikan program JKN kepada masyarakat. Karena pihak puskesmaslah yang paling dekat dengan masyarakat dan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang benar dan menyeluruh diharapkan seluruh pihak-pihak terkait mengerti akan kewajibannya dan apa yang harus ia laksanakan.